

PERTEMUAN REGULAR III
KOMITE PENGELOLA DATA PERIKANAN TUNA, CAKALANG DAN TONGKOL (KPDP-TCT)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
9 MEI 2018

Hari dan tanggal pertemuan	Rabu, 9 Mei 2018
Waktu Pertemuan (mulai dan akhir)	Mulai : 09.15 WITA Selesai : 16.10 WITA Dibuka oleh : Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Ditutup oleh : Sekretaris KPDP-TCT Provinsi Sulawesi Selatan
Tempat Pertemuan	Ruang Pertemuan di Hotel Ibis Makassar City Center – Sulawesi Selatan
Judul Pertemuan	Pertemuan Regular III Komite Pengelola Data Perikanan Tuna Cakalang Tongkol di Wilayah Pengelolaan Perikanan 713 Provinsi Sulawesi Selatan (KPDP-TCT) “Bersinergi dalam Pemenuhan Data dan Informasi Perikanan TCT”
Peserta (Nama/Institusi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulkaif S. Latief (Kadis KP Provinsi Sulsel) 2. Safar (Kabid Penangkapan DKP Provinsi Sulsel) 3. Febrian Budianto (Kasi PSDI DKP Provinsi Sulsel) 4. Nirfayanti basri (Staf DKP Provinsi Sulsel) 5. Mety Rivai (Staf DKP Provinsi Sulsel) 6. Nurlindah (Staf DKP Provinsi Sulsel) 7. Fatma Sudarmi (Staf DKP Provinsi Sulsel) 8. Nursyamsi Yunus (Staf DKP Provinsi Sulsel) 9. Agustina Kartini (PSDKP Provinsi Sulsel) 10. Syaiful (PSDKP Provinsi Sulsel) 11. Sultan H. Tare (Kadis KP Kabupaten Sinjai) 12. Alfian (Kadis KP Kabupaten Bulukumba) 13. Hasrum (DKP Kab. Pinrang) 14. Aminuddin S. (Kasi DKP Kota Makassar) 15. Muhammad Sofyan (DKP Kab. Bone) 16. Abdul Rachman (PSDKP Bone) 17. M. Yusuf (TPI Lappa) 18. Danial Sultan (UMI Makassar) 19. Tri Setianto (Poltek KP Bone) 20. Rikrik Rahardian (DIT PSDI-DJPT) 21. Sofi CH. S (PUSDATIN KKP) 22. M. Saiful (Kesyahbandaran Utama Makassar) 23. Baso Achmat (PSDKP Provinsi Sulsel) 24. Sofyan (PT. Chen Woo) 25. Abd. Rasyid (Nelayan Bone) 26. Jamaluddin (Nelayan Bone) 27. Fadli (Pengumpul Tuna di Kabupaten Bulukumba) 28. Ullah (Pengumpul Tuna di Kabupaten Sinjai) 29. Arman T. (Pengumpul Tuna di Kabupaten Sinjai) 30. Aditya Utama S. (MDPI) 31. Saut Tampubolon (MDPI)

	<p>32. A. Riza Baroqi (MDPI) 33. Sahril (MDPI) 34. Santri Dinalhusna (MDPI)</p>
<p>Proses Diskusi</p>	<p>*Menyanyikan Lagu Indonesia Raya *Doa bersama sebelum kegiatan dimulai *Pembukaan 1. Aditya (MDPI)</p> <p>Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh peserta yang hadir, terutama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala dinas Kelautan Perikanan kabupaten Sinjai dan Bulukumba, juga pak Anto selaku sekretaris KPDP TCT Provinsi Sulawesi Selatan. Manajemen kolaborasi di Indonesia seperti yang dilaksanakan sekarang ini sangat penting untuk terus dilaksanakan, terutama dalam mengelola Perikanan TCT, bagaimana agar Perikanan TCT ini terus berkelanjutan.</p> <p>Kolaborasi stakeholder sangat dibutuhkan untuk memperoleh data yang baik. Tanpa ada data yang baik, pengelolaan pun tidak akan baik. Dengan adanya data, dapat diketahui estimasi jumlah ikan tuna di laut untuk menjamin keberlanjutan. Hadirnya kami disini juga adalah untuk membantu DKP Provinsi karena kapasitas pemerintah sangat terbatas dalam memperoleh data yang baik. Selain membantu dalam pendataan TCT, kami juga di Lombok membantu memfasilitasi nelayan untuk pendaftaran pengukuran ulang kapal di Labuhan Lombok, Lombok Timur. Begitu juga di Sulawesi Utara, kami memfasilitasi pembuatan Persetujuan kerjasama antara DKP Provinsi Sulawesi Utara dan KSOP Manado dalam hal registrasi kapal dan membantu nelayan memenuhi persyaratan pendaftaran kapal skala kecil. Karena jika dilihat, nelayan-nelayan merasa kesulitan memancing dikarenakan aturan-aturan (Dokumen kapal) yang harus dipenuhi terutama untuk kebutuhan ekspor. Selain dokumen kapal, rumpon menjadi isu besar saat ini untuk nelayan kecil. Hal tersebut perlu didiskusikan bersama di KPDP.</p> <p>Dari kegiatan ini, semua stakeholder bisa saling memberi informasi dan masukan demi pengelolaan Perikanan di WPP 713 khususnya. Oleh karena itu, besar harapannya kerjasama seluruh stakeholder dapat terus berlanjut.</p> <p>2. Sulkaf S. Latief (Kadis KP Prov. Sulawesi Selatan)</p> <p>Ucapan terimakasih disampaikan oleh kepala DKP Provinsi Sulawesi selatan kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan KPDP. Permohonan maaf dari tiga kali pertemuan, baru kali ini bisa hadir.</p> <p>Saat ini, semua orang mulai sadar bahwa laut itu luas, namun sumberdaya nya jika tidak dijaga bisa habis, termasuk TCT. Jaman dulu, sekitar tahun 1973 di jayapura, tuna seberat lebih 100 kg itu biasa. Saat ini tuna sebesar itu sudah sangat jarang. Untuk Sulawesi Selatan, jumlah produksi tidak pernah bergeser untuk TCT sebanyak 50.000 ton. Saat ini, permintaan terkait <i>traceability</i> diluar negeri sangat tinggi, karena mereka tidak hanya berfikir tentang makan, namun tentang keberlanjutan ikan yang mereka makan, apakah ditangkap dengan cara yang baik. Jika tidak, importir dapat memboikot untuk tidak membeli tuna, sehingga harga tuna pun berpengaruh jika hanya dijual dalam negeri.</p> <p>Keberlanjutan Perikanan sangat penting, karena akan mempengaruhi keberlanjutan penghasilan nelayan, supplier, juga perusahaan. Jika ikan habis, nelayan tidak dapat ikan, supplier dan perusahaan juga tidak dapat membeli dan menjual ikannya. Bicara soal rumpon, perlu diatur jumlah dan tata letaknya. Karena memang</p>

tanpa rumpon, nelayan kecil (tradisional) akan sangat sulit mencari ikan dan membutuhkan operasional lebih banyak.

Tahun 2017, jumlah ekspor Tuna Provinsi Sulawesi Selatan menurun, namun nilai meningkat. Tahun 2017, nilai ekspor 15 juta dollar, sekarang 17 juta dollar. Volume ekspor menurun, harga meningkat. Hal ini yang diinginkan oleh dirjen Perikanan tangkap (Syarif widjaya). Menangkap sedikit, memiliki nilai yang tinggi, sehingga jumlah ikan tetap terjaga, hargapun meningkat. Karena jika volume jumlah ikan tinggi, harga ikan akan murah. Selain itu, berkaitan dengan izin melaut. Sangat berat untuk nelayan yang tinggal di pulau-pulau kecil, contohnya Selayar, lokasi tidak adanya petugas PDSKP dan Syahbandar yang mengeluarkan SLO dan SPB, sehingga nelayan sangat kesulitan memperoleh izin tersebut. Padahal, sangat dekat dari daratan pulau tempat nelayan tinggal ikan-ikan sangat banyak. Sehingga memaksa mereka untuk membuat izin terlebih dahulu ke pulau seberang (Makassar misalnya) demi dapat menangkap ikan yang sangat dekat dengan daratan pulau selayar. Hal ini perlu dicarikan solusi agar nelayan dapat lebih mudah memperoleh ikan.

UU 23 Tahun 2014 (Bidang Perikanan) juga menjadi isu penting terkait Perikanan. Dimana DKP Kabupaten tidak memiliki wewenang mengatur wilayah laut. Sehingga DKP Provinsi yang memiliki sumberdaya terbatas, memiliki banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan dari daerah-daerah di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Bukan tidak setuju terhadap aturan yang ada, namun perlu dipertimbangkan apakah aturan tersebut dapat diterapkan di lapangan. Dengan Pengantar tersebut, dengan resmi acara dibuka.

*** Sesi Foto Bersama**

*** Coffe Break**

***Pemaparan Materi oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Sulawesi Selatan, pemaparan Data oleh Kadis Bulukumba dan Sinjai, Penyampaian Capaian Rencana Kerja KPDP 6 bulan dan Rencana kerja DKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 oleh Sekretaris KPDP TCT Provinsi Sulawesi Selatan (Fasilitator : Saut Tampubolon)**

A. Saut Tampubolon (Pengantar)

Semakin meningkatnya jumlah manusia, yang sejalan dengan peningkatan konsumsi ikan, kedepannya ikan akan menjadi barang yang langka karena jumlahnya yang menurun. Indonesia memegang peranan penting, yang mana merupakan produsen ikan terbesar kedua di dunia setelah Cina. Tuna Indonesia hampir nomor satu di Dunia. Perairan WPP 713, 714 dan 715, merupakan penghasil ikan sebanyak 40% produksi nasional, 30 % Samudera Hindia dan 30 % Samudera Pasifik dari 1,2 Juta ton total produksi ikan Indonesia/tahun. Oleh sangat itu hal ini sangat penting untuk didiskusikan.

***Safar (Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Sulawesi Selatan)**

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Provinsi terbanyak penyelesaian dokumen SIUP, SIPI dan dokumen lainnya diseluruh provinsi di Indonesia. Ini mencerminkan bahwa kepatuhan pelaku Perikanan terhadap aturan tinggi. DKP Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalankan Sembilan Perjanjian kerjasama dengan provinsi lain terkait andon. Terkait tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan TCT di Sulawesi Selatan, berikut rinciannya untuk tahun 2016 dan 2017 ;

1. A. (Data Statistik DKP Provinsi Sulawesi Selatan 2016)

Produksi Perikanan Tangkap	: 312.380,8 Ton
Tuna Cakalang dan Tongkol	: 57.273,3 Ton

B. (Data Statistik DKP Provinsi Sulawesi Selatan 2017)

Produksi Perikanan Tangkap : 359.399,9 Ton
Tuna Cakalang dan Tongkol : 59.024,0 Ton

2. Ekspor TCT (US \$ 1.000)

A. (Data Statistik DKP Provinsi Sulawesi Selatan 2016)

❑ Volume : 2.373,4 Ton
❑ Nilai : 15.061,4 US \$

B. (Data Statistik DKP Provinsi Sulawesi Selatan 2017)

❑ Volume : 2.243,0 Ton
❑ Nilai : 17.000,0 US \$

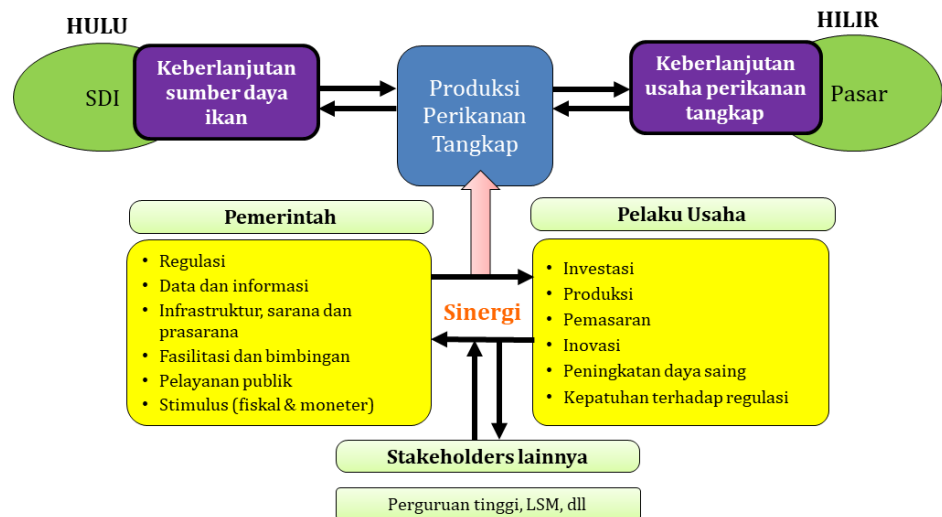
Dilihat dari data diatas, terjadi penurunan volume ekspor pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Namun, terjadi peningkatan nilai jual terhadap produk ekspor.

3. Ekspor Tuna Cakalang Tongkol Japan, Amerika, Arab Saudi dan Uni Eropa

***Isu Strategis di bidang Perikanan Tangkap Khususnya Ikan TCT di Sulawesi Selatan**

1. Usaha penangkapan ikan di dominasi “ Skala Kecil” antara 5-10 GT (2017), namun setelah dilakukan pengukuran ulang, terjadi peningkatan ukuran diatas 10 GT
2. Over fishing dibeberapa daerah
3. Ketidakseimbangan pemanfaatan SDI Ikan Tuna Cakalang Tongkol
4. Degradasi dan kerusakan lingk. habitat SDI dan ekosistim pesisir.
5. Konflik antar nelayan
6. Kurangnya data dan informasi tentang pemanfaatan SDI TCT
7. Implementasi Pemerintahan Daerah terkait UU 23 tahun 2014
8. Keterbatasan SDM nelayan secara kualitas dan kuantitas
9. Sosialisasi aturan-aturan belum optimal
10. Penggunaan tehnologi masih terbatas
11. Pelanggaran jalur penangkapan ikan
12. Pelanggaran aturan perizinan
13. Sarana dan prasarana masih terbatas

Untuk menuju keberlanjutan diperlukan “sinergi” seluruh pelaku perikanan. Baik pemerintah, pengusaha, nelayan, Universitas, LSM, dll. Berikut merupakan pilar keberlanjutan



***Febrian Budiarto (Sekretaris KPDP TCT Provinsi Sulawesi Selatan)**

Ucapan terimakasih dari Sekretaris atas fasilitasi yang diberikan oleh MDPI, sehingga stakeholder KPDP TCT Provinsi Sulawesi Selatan dapat berkumpul bersama untuk berdiskusi terkait perikanan TCT di provinsi Sulawesi Selatan.

*Kegiatan KPDP TCT tahun 2017 ;

1. Sosialisasi Penanganan ikan diatas kapal kepada nelayan Tuna di Kabupaten Bone
2. Pertemuan Komite kedua yang diadakan di Bone
3. Lokakarya pengelolaan rumpon di Bogor
4. Pengecekan fisik kapal untuk penerbitan SIUP dan SIPI

*Target tahun 2018

- ✓ Mendukung Proses Kebutuhan Data Tuna Cakalang dan Tongkol di Sulawesi Selatan
- ✓ Mendukung pelaksanaan konsep "SATU DATA" dari KKP RI
- ✓ Mendukung penyelesaian identifikasi dan pencatatan rumpon di Sulawesi Selatan
- ✓ Mendukung proses pendaftaran dan pengukuran kapal nelayan dibawah 10 – 30 GT
- ✓ Menyediakan dukungan untuk pengembangan sumberdaya manusia bagi komite
- ✓ Koordinasi dan sinkronisasi dengan Lembaga Pengelola WPP 713

*Rencana Kegiatan Tahun 2018

- ✓ Identifikasi rumpon, penentuan calon lokasi dan pengumpulan data rumpon
- ✓ Koordinasi dengan kab/kota untuk menentukan strategi kuota rumpon
- ✓ Memfasilitasi proses pengukuran kapal di kab/kota
- ✓ Pelatihan analisa dan pengolahan data
- ✓ Koordinasi dengan sekretaris eksekutif WPP 713
- ✓ Operasionalisasi sekretariat KPDP TCT di Sulawesi Selatan
- ✓ Pertemuan Reguler KPDP TCT IV

***Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai**

Nelayan Sinjai hampir 9000 orang, jumlah kapal penangkap TCT sekitar 800 kapal. Nelayan-nelayan Sinjai melakukan aktivitas penangkapan di area WPP 713, 714 dan kadang di 573. Terkait rumpon, nelayan Sinjai sangat bergantung kepada rumpon. Jika tidak menggunakan rumpon, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencari ikan. Rumpon harus memiliki izin. Rumpon untuk menangkap tuna biasanya memiliki jarak lebih dari 12 mil, dimana diperlukan izin dari pemerintah pusat. Sangat sulit bagi nelayan untuk mengurus izin rumpon.

Berkaitan dengan UU 23 tahun 2014, Kabupaten tidak memiliki kewenangan terhadap laut. Hal ini sangat sulit bagi kabupaten dalam mengatasi illegal fishing seperti salah satu contoh di sinjai, ada metode penangkapan baru dengan bahan pembersih lantai (fixal) dicampur dengan H2SO4 dalam menangkap gurita yang dapat mencemari perairan. Saat ini yang bisa dilakukan adalah bekerjasama dengan pol air dalam menekan aktivitas illegal fishing tersebut.

Berbicara tentang data tahun 2017, jumlah cakalang dan tongkol yang mendarat di TPI Lappa sekitar 2573 ton, untuk tuna 1911 ton. Saat ini 2018 (januari-maret) untuk ikan cakalang dan tongkol 506 ton, tuna 975 ton.

***Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba**

Kepala Dinas Bulukumba menyampaikan bahwa beliau tidak memiliki latar belakang perikanan. Ada hal yang masih dibingungkan yaitu pengurusan kapal sangat banyak sekali surat yang diurus, mulai dari membuat kapal, hingga melaut. Selain surat, banyak sekali instansi yang terlibat dalam melakukan penangkapan di laut (tidak hanya perikanan). Ini sangat menyusahakan nelayan.

Berbicara tentang data, Kabupaten Bulukumba tahun 2017 memiliki produksi

perikanan tangkap sekitar 50.000 ton. Untuk Tuna tahun 2017 memiliki produksi 2231 ton, sedangkan untuk cakalang 2639 ton dan tongkol 8376 ton.

***Sesi Diskusi**

- Syaiful (Kepelabuhanan)

1. Kewenangan ditarik ke provinsi, anggaran dikurangi
2. Terlalu banyak pemeriksa di laut
3. Terkait rumpon, aturannya sangat menyulitkan bagi nelayan (izin, tata cara pemasangan, dll)
4. Penanganan ikan dibutuhkan untuk nelayan.

- Daniel (UMI Makassar)

1. Tolong diinformasikan jika ada Bluefin tertangkap
2. Metode pengukuran kapal banyak, mungkin itu yang menyebabkan kesalahan pengukuran.
3. Sulawesi selatan ada salah satu spesies yang hampir punah di danau tempe, sampai sekarang belum ada usaha untuk melestarikannya (ikan glos/bungo).
4. Pelabuhan Untia belum maksimal difungsikan, perlu dimaksimalkan.

Jawaban :

- Pak Safar

- Pelabuhan UNTIA segera diperbaiki, karena akses jalan masih belum bagus, begitu juga fasilitas lain segera ditambahkan (SPDN).
- Pengukuran kapal merupakan dosa lama, bukan kesalahan rumus.
- Ikan Bungo sudah ditangani. Masih banyak, hanya yang ukuran besar tidak ada. Saya selama 15 tahun di UPT Pembenihan air tawar.
- Penanganan paska panen segera ditindaklanjuti

***Istirahat, Shalat dan Makan**

***Rikrik Rahardian (PUSDATIN)**

Mandat kebijakan satu data, merupakan mandate langsung dari presiden. Dimana tujuannya adalah seluruh data terintegrasi dan sinkron satu sama lain, sehingga data dari daerah atau pusat "sama". Satu Data KP adalah suatu program yang meliputi seluruh data kelautan dan perikanan, termasuk Data KUSUKA, Produksi, dan Bantuan Pemerintah. Prosedur operasi standar meliputi ;
Validasi Pusat – Verifikasi Ulang – Kalkulasi Produksi – Validasi Dinas – Tutup Buku – Diseminasi. Data yang didapat oleh pengolah data (penyuluh) akan digunakan untuk perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, peraturan, perencanaan dan pengambilan keputusan.

Rekap Data Produksi (SATU DATA) Sementara Tuna, Tongkol, dan Cakalang Menurut Provinsi Tahun 2017 untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah ;

1. cakalang : 21.033,46 ton
2. Tongkol : 21.358,49 ton
3. Tuna : 8.196,90 ton

Total = 50.588,85 ton. Memiliki selisih **8439,15 ton** dari data produksi DKP Provinsi, yaitu **59.024,0 ton**. Data yang bersumber dari satu data masih dalam proses validasi dengan dinas, jika sudah selesai, akan dipastikan kembali jumlah data baik dari Satu data, maupun dari DKP Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Anto selaku moderator juga menambahkan bahwa memang untuk mendapatkan data akurat dilapangan itu sulit sekali, perlu adanya kerjasama antar pelaku usaha, nelayan dan pengumpul data agar diperoleh data yang bagus.

***Sahril (MDPI)**

Memaparkan hasil pengumpulan data sampling di Bone tahun 2017. Pada bulan Januari – Maret, tidak ada pendaratan TCT yang disebabkan oleh musim barat. Sehingga nelayan TCT pada waktu tersebut beralih target tangkapan menjadi menangkap ikan karang.

Dilihat dari data, Produksi tangkapan puncak penangkapan TCT terjadi pada bulan April yang didominasi oleh spesies Yellowfin Tuna (YFT). Sayangnya, jika dilihat dari ukuran ikan YFT yang tertangkap, masih banyak yang kategori belum dewasa. Begitu juga untuk jenis Big Eye Tuna (BET).

Selain Pemaparan hasil pengumpulan data, disampaikan pula terkait alat pemantauan diatas laut yang sudah mulai dilakukan oleh MDPI untuk memastikan lokasi penangkapan, dan aktivitas nelayan dilaut. Alat pemantau tersebut adalah Spot Trace (memastikan fishing ground) dan Timelaps Camera (Untuk melihat aktivitas nelayan diLaut).

***Penyusunan Rencana aksi (Fasilitator ; Saut Tampubolon) *Terlampir**

Prepared by :

A. Riza Baroqi

Co. Management Officer

MDPI

ISU dan RENCANA AKSI KPDP DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

HASIL KESEPAKATAN PERTEMUAN KPDP TCT TANGGAL 9 MEI 2018

Skala Prioritas	Isu	Rencana Aksi	PIC	Budget Contribution	Waktu Selesai
1	Peraturan Menteri KP sulit diimplementasikan secara efektif khususnya di daerah kepulauan, misalnya seperti penerbitan SLO dan SPB untuk kapal yang berpangkalan di desa atau di daerah yang belum memiliki petugas SLO dan SPB, termasuk UU 23 2014 tentang Pemerintah Daerah.	Gap analisis efektifitas implementasi kebijakan perikanan tangkap di Provinsi Sulsel.	DKP Provinsi Sulawesi Selatan dan MDPI	MDPI dan APBD Prov. Sulsel	Juni - Desember 2018.
2	Pengukuran/pengukuran ulang kapal penangkap ikan memerlukan bantuan dari Kesyahbandaran Utama Makassar	Pembuatan Perjanjian Kerjasama Pengukuran Kapal antara Dinas KP Provinsi Sulawesi Selatan dan Kesyahbandaran Utama Makassar.	DKP Prov. Sulsel, Kesyahbandaran Utama Makassar dan MDPI	DKP Prov. Sulsel, Kesyahbandaran Utama Makassar dan MDPI	Juni - Oktober 2018
3	Kewajiban penerapan siji awak kapal mulai 1 Januari 2019	Pertemuan sosialisasi kepada nelayan dengan nara sumber dari Kesyahbandaran Utama Makassar. Rencana diklat SKK 30 dan 60 mil gratis oleh Kesyahbandaran Utama Makassar. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 4 orang/kabupaten dari 19 Kabupaten yang berbatasan dengan laut.	Kesyahbandaran Utama Makassar dan DKP Prov. Sulsel	Kesyahbandaran Utama , APBD Provinsi dan MDPI	Juli 2018
4	Identifikasi profile rumpon yang telah ditebar nelayan, karena nelayan tidak bisa menangkap tanpa bantuan rumpon.	Identifikasi profil dan pemetaan rumpon di wilayah perairan Provinsi Sulsel	DKP Prov. Sulsel , DKP kab/kota, UMI	APBD Prov. Sulsel	Juli - Desember 2018

			Makassar , UNHAS dan Politeknik KP Bone serta Nelayan		
5	Terlalu banyak pihak yang melakukan pengawasan di Laut	Penyusunan naskah proposal untuk mengubah UU Perikanan terkait dengan aparat pengawas perikanan di laut	UMI Makassar, UNHAS dan MDPI	MDPI	18 Agustus 2018
6	Perlu pelatihan penanganan paska panen untuk nelayan atau pelatihan cara penanganan ikan yang baik diatas kapal untuk nelayan dibawah 30 GT.	Pelatihan cara penanganan ikan yang baik diatas kapal untuk nelayan dibawah 30 GT.	DKP Prov. Sulsel dan DJPT (Ditkapi)	APBD Sulsel APBN, MDPI Prov. dan serta	September 2018
7	Capacity Building untuk mahasiswa dan Industri terkait data dan Traceability	Pelatihan pengumpulan data untuk mahasiswa dan ketelusuran (<i>Traceability</i>) untuk Industri.	MDPI	MDPI	Agustus 2018
8	Penguatan kapasitas dalam rangka penanggulangan penangkapan ikan dengan cara merusak (<i>destructive fishing practices</i>) baik dengan bom atau bius atau bahan lainnya.	Workshop dan/atau Penerbitan Publikasi seperti poster, booklet tentang bahaya penangkapan ikan dengan cara merusak (<i>destructive fishing practices</i>).	DKP Prov. Sulsel, DKP kab /kota, dan serta MDPI (Buat Poster kampanye combat IUU Fishing)	APBD Kota Makassar, sinjai, DKP Prov. Sulsel, DKP Kota Makassar, Kab. Sinjai, Kab. Bulukumba dan MDPI	Juli – Agustus (Desain Poster)
9	Rantai pemasaran ikan hasil tangkapan terlalu panjang, yang praktis mengurangi pendapatan nelayan.	Workshop Memperkenalkan Fair Trade	MDPI	MDPI	November 2018 (KPDP IV)
10	Sinergi KPDP TCT dengan LPP WPPNRI 713	Integrasi KPDP kedalam Lembaga pengelola WPPNRI 713 dengan sekretariat di UNTIA.	DKP Prov. Sulsel	APBD Sulsel Prov.	Desember 2018